

**RENCANA KERJA (RENJA)  
TAHUN 2023**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rencana Kerja (Renja) OPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD .

Dokumen Renja OPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan OPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Rencana

Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja OPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Rencana Kerja (Renja) OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat adalah :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  10. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
20. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 44 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.
21. Peraturan Bupati Pasaman Barat 94 Tahun 2016 tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan 1 (satu) tahunan yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan pembangunan bidang kependudukan yang sinkron pada Tahun 2023.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
2. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi perumusan kebijakan dan penyusunan program di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Pasal 78 ayat (1), maka sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) SOPD adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 *Latar Belakang*, Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2 *Landasan Hukum*, Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 1.3 *Maksud dan Tujuan*, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- 1.4 *Sistematika Penulisan*, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

#### **BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022**

- 2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah*, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2 *Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah*, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SOPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
- 2.3 *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah*, memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala

daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SOPD dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.

- 2.4 *Review terhadap Rancangan Awal RKPD*, Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut.
- 2.5 *Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat*, menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan pelaksanaan musrenbang.

### **BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional*, memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi SOPD.
- 3.2 *Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah*, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.
- 3.3 *Program dan Kegiatan*, memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD

### **BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **BAB V : PENUTUP**

Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja OPD bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja OPD yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD. Melalui evaluasi akan diketahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 4 (Empat) program yang terdiri dari 11 kegiatan. Sementara pada tahun 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 4 (Empat) program yang didukung oleh 12 kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021 memuat pencapaian target kinerja tahun 2021 berdasarkan rencana kerja sebagaimana telah disusun. Sedangkan, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022 memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun berjalan, yang kemudian dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun sebelumnya serta yang akan datang

Adapun informasi yang akan didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2021 serta perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (TA 2022) disajikan pada Tabel T-C. 29 di bawah ini :

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2021

NO	Sasaran	Program/Kegiatan /sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2021		Presentase Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2022)		Presentase Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)	
				5	6	7	8	9=8/7X100	10=8/5x100%						
				Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja	Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp) (%)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp) (%)
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Program Pengelola Informasi Kependudukan	Jumlah Instansi yang memiliki PKS dan Akses Pemanfaatan data adminduk												
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>									<b>59,750,00</b>						
1	Meningkatnya kualitas pelayanan adminduk dan pencatatan sipil	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Terkelolanya data kependudukan yang diolah untuk dipakai oleh pengguna data					11 Kecamatan	39,750,000				-		
2	Meningkatnya kualitas pelayanan adminduk dan pencatatan sipil	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Hak Akses Pemanfaatan Data Ware house Kependudukan					5 OPD	10,000,000				-		

	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah											
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>									<b>2,937,134,379</b>					
3	Meningkatnya kualitas pelayanan adminduk dan pencatatan sipil	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan					24 orang	2,761,054,379	24 orang				
4	Meningkatnya kualitas pelayanan adminduk dan pencatatan sipil	Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah non PNS (PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran					37 orang	110,500,000	37 orang				
5	Meningkatnya kualitas pelayanan adminduk dan pencatatan sipil	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan honorarium petugas pengelolaan keuangan					7 orang	65,580,000	7 orang				
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>									<b>15,600,000</b>					
6	Meningkatnya kualitas pelayanan adminduk dan pencatatan sipil	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah ASN penatausahaan barang milik daerah					2 orang	15.600,000	2 orang				
<b>Administrasi Kpegawaian Perangkat Daerah</b>									<b>61,542,400</b>					

7	Meningkatnya kualitas pelayanan adminduk dan pencatatan sipil	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah petugas yang mengikuti sosialisasi					1 angkatan	50,641,400						
8	Meningkatnya kualitas pelayanan adminduk dan pencatatan sipil	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek/Diklat					1 orang	10,901,000						
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>									<b>92,896,75</b>						
9	Meningkatnya kualitas pelayanan adminduk dan pencatatan sipil	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan alat listrik dan elektronik					100%	5,051,000						
10	Meningkatnya kualitas pelayanan adminduk dan pencatatan sipil	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga					1 paket	1,000,000						
11	Meningkatnya kualitas pelayanan adminduk dan pencatatan sipil	Jumlah Pemenuhan barang cetak dan penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetak dan penggandaan					1 paket	10,000,000						
12	Meningkatnya kualitas pelayanan adminduk dan pencatatan sipil	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti, Jumlah akses DWH dan PKS, Jumlah rapat, koordinasi dari pemerintah provinsi/pusat (K/L) yang diikuti					100%	76,845,750						

<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>									<b>45,000,500</b>					
13	Meningkatnya kualitas pelayanan adminduk dan pencatatan sipil	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya					1 Unit	35,000,500					
14	Meningkatnya kualitas pelayanan adminduk dan pencatatan sipil	Pegadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor					1 Unit	10,000,000					
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Umum Pemerintahan Daerah</b>									<b>396,599,142</b>					
15	Meningkatnya kualitas pelayanan adminduk dan pencatatan sipil	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pemenuhan kebutuhan sumber daya air, listrik dan internet untuk operasional kantor					12 Bulan	100,000,000					
16	Meningkatnya kualitas pelayanan adminduk dan pencatatan sipil	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa kebersihan dengan pihak ketiga, jumlah pelayanan secara aktif, jumlah cetak tanda terima					Akte kelahiran 12,000 Dokumen, Akte perkawinan 100%, KTP 100%	75,000,000					
17	Meningkatnya kualitas pelayanan adminduk dan pencatatan sipil	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Supras Dokumen Kependudukan dan Identitas resmi anak					20.000 Keping	132,099,142					
18	Meningkatnya kualitas pelayanan adminduk dan pencatatan sipil	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah ATK yang dibutuhkan					1 paket	89,500,000					



<b>Pendaftaran Penduduk</b>									<b>151,181,480</b>						
24	Meningkatnya kualitas pelayanan adminduk dan pencatatan sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk					KK 100 %, KTP 100 %, KIA 25 %	90,365,000						
25	Meningkatnya kualitas pelayanan adminduk dan pencatatan sipil	Pendataan Penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	Tersedianya data penduduk yang rentan dimasing – masing Nagari					19 Nagari	36,200,000						
26	Meningkatnya kualitas pelayanan adminduk dan pencatatan sipil	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa terkait pendaftaran penduduk	Jumlah pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk					11 Kecamatan	24,616,480						
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Program Pencatatan Sipil	% penduduk usia > 18 tahun yang mempunyai akte kelahiran, % penerbitan akte kematian, penerbitan akte perceraian												
<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>									<b>71.100.000</b>						
27	Meningkatnya kualitas pelayanan adminduk dan pencatatan sipil	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Terlaksananya pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk					Elahiran 100 %, A. Kematian 100 %, A. Perkawinan 100 %	51.100.000						
28	Meningkatnya kualitas pelayanan adminduk dan pencatatan	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan						11 kecamatan	20,000,000						

	sipil	peristiwa penting terkait pencatatan sipil													
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Program Pengelola Informasi Kependudukan	Jumlah Instansi yang memiliki PKS dan Akses Pemanfaatan data adminduk												
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>									<b>59,750,00</b>						
1	Meningkatnya kualitas pelayanan adminduk dan pencatatan sipil	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Terkelolanya data kependudukan yang diolah untuk dipakai oleh pengguna data					11 Kecamatan	39,750,000						
2	Meningkatnya kualitas pelayanan adminduk dan pencatatan sipil	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Hak Akses Pemamanfaatan Data Ware house Kependudukan					5 OPD	10,000,000						
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :															
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :															

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pada RPJMD tahun 2016-2021, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten Pasaman Barat mendukung pencapaian sasaran kepala daerah pada misi 1 RPJMD Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan hal tersebut di atas, ditetapkan 1 (satu) tujuan strategis pembangunan DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026, yakni : Penerapan tatakelola pemerintahan profesional, akuntabel dan inovatif.

**Tabel T.C 30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Kabupaten Pasaman Barat**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke				Realisasi Capaian Tahun ke		Proyeksi		
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	7	8	9		11	12	18	19	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD		Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	B	B	B	B	CC	B	B	B	
			Opini terhadap laporan keuangan OPD		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Level Maturitas SPIP	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	Program Penataan administrasi Kependudukan		1. Cakupan Kepemilikan KTP-Elektronik	76%	84%	88%	92%	95%	93%	94,12%	95%	100%	
			2. Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran 0 s.d 18 Th	40%	60%	75%	80%	90%	93,78%	95,88%	95,5%	100%	
3	Program Informasi Administrasi Kependudukan		Rata - rata lama waktupelayanan kependudukan	14 HARI	3 HARI	3 HARI	2 HARI	1 HARI	1 HARI	1 Jam	1 Jam	1 Jam	

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten Pasaman Barat dihadapkan pada sejumlah isu-isu penting yang berimplikasi terhadap penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah. Adapun isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian adalah :

1. Pencapaian target rekam/cetak ktp-el 100%
2. Memaksimalkan layanan online demi memberi kemudahan kepada masyarakat.
3. Pemutakhiran Data berkelanjutan menuju satu data kependudukan.
4. Pencapaian target kepemilikan KIA 30%
5. Pemanfaatan data kependudukan oleh semua OPD

### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kab. Pasaman Barat membutuhkan pagu anggaran sebesar **Rp. 4.072.824.372** ( *Empat milyar tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua*) untuk mencapai target kinerja pada tahun 2023. Pagu dana tersebut diproyeksikan untuk mendukung pelaksanaan-kegiatan dari 4 program (teknis dan rutin) yang direncanakan :

Adapun telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 dapat disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel T-C. 31**

Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis kebutuhan					Catt Pen
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian (%)	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1.	<b>Penataan Administrasi Kependudukan</b>	Capil	<b>Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran 0 s.d 18 Th</b>	75%	1.694.753	<b>Penataan Administrasi Kependudukan</b>	Capil	<b>Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran 0 s.d 18 Th</b>	93,78%	2.007.711	
			<b>Cakupan Kepemilikan KTP- Elektronik</b>	88%				Capil	<b>Cakupan Kepemilikan KTP-Elektronik</b>		
	Peningkatan pelayanan akte kelahiran	Capil	Jumlah akte Kelahiran yang diterbitkan	75%	103.240	Peningkatan pelayanan akte kelahiran	Capil	Jumlah akte Kelahiran yang diterbitkan	23.300 Akte Kelahiran	133.386	

	Pelaksanaan Penerapan e-KTP	Capil	Jumlah KTP-el yang duterbitkan	88%	173.166	Pelaksanaan Penerapan e-KTP	capil	Jumlah KTP-el yang duterbitkan	17.201 Keping	212.112	
2.	<b>Program Informasi Administrasi Kependudukan</b>	Capil	<b>Persentase Instansi Pemerintah Pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan</b>	11 Kec	253.230	<b>Persentase Instansi Pemerintah Pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan</b>	capil		11 Kec	97.652	
	<b>Implementasi sistem Administrasi Kependudukan</b>	Capil	Terpeliharanya akurasi data kependudukan melalui jaringan dan aplikasi SIAK	11 Kec	70.082	<b>Implementasi sistem Administrasi Kependudukan</b>	capil	Terpeliharanya akurasi data kependudukan melalui jaringan dan aplikasi SIAK	11 Kec	97.652	

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dari Masyarakat**

Mengingat tugas pokok dan fungsi DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten Pasaman Barat dalam mengkoordinasikan dan mensinergikan program-program pembangunan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Pasaman Barat tidak memiliki usulan program dari masyarakat.

**BAB III**  
**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN**

Didalam undang- undang no. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang – undang no. 24 Tahun 2013 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diantaranya bertujuan untuk menyediakan data dan informasi Kependudukan secara rasional yang akurat, lengkap, mutakhir sehingga menjadi acuan untuk perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya

**3.1. Tujuan dan Sasaran Renja OPD**

Berdasarkan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, maka tujuan yang ingin dicapai dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 adalah seperti tertuang pada tabel berikut:

**Tabel TC.25.**  
**Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Pelayanan Perangkat Daerah**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target						KET
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah		% penurunan temuan	50%	40%	30%	20%	10%	5%	
			Nilai SAKIP	B	B	B	BB	BB	BB	
			Level Maturitas SPIP	2,11	2,35	2,48	2,6	>2,26	>2,26	
		Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	% penurunan temuan	50%	40%	30%	20%	10%	5%	
			Nilai SAKIP	B	B	B	BB	BB	BB	
			Level Maturitas SPIP	2,11	2,35	2,48	2,6	>2,26	>2,26	

2	<b>Peningkatan kualitas Pelayanan Adminduk dan Pencatatan Sipil yang Profesional Akuntabel dan Inovatif</b>		Indeks Kepuasan Masyarakat	83	84,5	85	85,7	85,8	86	
		Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	84,5	85	85,7	85,8	86	

### 3.2. Rencana Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, selain menjalankan program rutin, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat selaku koordinator dalam perencanaan pembangunan daerah bertanggung jawab mengkoordinasikan keselarasan program-program pembangunan daerah di seluruh OPD yang berada di bawah lingkup koordinasinya. Secara umum, rencana program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pasaman Barat Tahun 2023 tertuang dalam 4 (empat) program yang akan didukung oleh 11 (Sebelas) kegiatan, seperti terlihat pada tabel berikut

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
2		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
2	12	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>									5,993,299,071			6,592,628,978		
2	12	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>									5,713,999,071			6,285,398,978	
2	12	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>									17.200.000			17.920.000
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah			Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			10.000.000			10.000.000	
2	12	01	2.01	07	Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah hasil survey	Persentase survey yang di peroleh	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Laporan	100%	7.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.920.000	
2	12	01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>									3.002.508.097			3.011.634.379
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah PNS yang menerima gaji dan tunjangan	Presentasi Realisasi Keuangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	24 Orang	100%	2,761,054,379	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.811.054.379	

2	12	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah Non PNS(PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran	Presentasi Realisasi Keuangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	38 Orang	100%	155.873.718	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				115.000.000
2	12	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	Presentasi Realisasi Keuangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	7 Orang	100%	85.580.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				85.580.000
2	12	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>								<b>15.600.000</b>				<b>15.600.000</b>	
2	12	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah ASN penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola BPBD	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 Orang	624 Unit	15.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15.600.000
2	12	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								<b>57.705.500</b>				<b>61.010.000</b>	
2	12	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah Petugas yang mengikuti sosialisasi	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 angkatan	100%	39.605.500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				40.100.000
2	12	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/diklat	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 Orang	100%	18.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10.910.000
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah pakaian ASN yang terpenuhi	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	63 orang	100%	24.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				24.000.000
2	12	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								<b>92.501.000</b>				<b>97.130.210</b>	

2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah penyediaan alat listrik dan elektronik	Persentase penyediaan alat listrik dan elektronik	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Paket	1 Paket	5,051,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5.151.000
2	12	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Presentase Penyediaan Peralatan Rumah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Paket	1 Paket	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,100,000
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah Pemenuhan barang cetak dan penggandaan	Pemenuhan barang cetak dan penggandaan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Paket	1 Paket	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				11,000,000
2	12	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah jaringan SIAK dalam pelayanan PIAK	Presentase OPD dan kecamatan yang melaksanakan AK	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Disdukcapil dan 11 kecamatan	100%	11.000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12.100,000
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>45.500.000</b>				<b>50.050.000</b>		
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Presentase pengadaan barang milik daerah penunjang uasan kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Unit	100%	35.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				39.050.000
2	12	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah pengadaan gedung kantor	Presentase pengadaan barang milik daerah penunjang uasan kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Unit	100%	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				11,000,000
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>398.809.056</b>				<b>406.809.300</b>		

2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah ATK yang dibutuhkan	Presenase pemenuhan kebutuhan ATK	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 paket	100%	78.500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				76.500,000
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan sumber daya air, listrik, dan internet untuk operasional kantor	Cakupan pemenuhan penyediaan Jasa layanan penunjang urusan kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	100%	100.000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				110.000,000
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah pelayanan secara aktif, jumlah cetak tandatenerima	Cakupan pemenuhan penyediaan Jasa layanan penunjang urusan kantor, Presentse Pelayanan keliling	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 bulan	100%	75.000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				75.000,000
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah Sapras Dokumen Kependudukan	Persentase terpenuhinya sapras dokumen kependudukan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Paket	100%	145.309,056	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				145.309,300
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>155.200,000</b>				<b>162.720,000</b>		
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayara pajak/KIR	Presentase pengadaan barang milik daerah peunjang uusan kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	21 unit	100%	75.200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				82.720,000
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	Presentase pengadaan barang milik daerah peunjang uusan kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	48 unit	100%	55.000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				55.000,000

2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang terpelihara	Presentase pengadaan barang milik daerah penunjang uasan kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Unit	100%	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			25,000,000
2	12	02			<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>								<b>153,963,219</b>			<b>153,963,219</b>	
2	12	02	2.01		<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>								<b>153,963,219</b>			<b>153,963,219</b>	
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	-Jumlah ribbon film yang dibeli -Jumlah ribbon colour -Cleaning kit -Blanko KIA yang dibeli -Blanko dan folmulir dan buku pendaftaran penduduk yang dibeli	Presentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	KTP 100% KIA 50%	-Ribbon fargo 30.000x8.700 -Ribbon evolis 20.000x5.000 -Blanko KIA 20.000 keping x 5.000	100%	35.763.219				55.200.000
					Pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Terlaksananya pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dan penduduk non permanen	Tersedianya data penduduk rentan administrasi kependudukan dan non permanen	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	19 Nagari	100%	56.200.000				56.200.000
					Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah pelayanan secara aktif pengurusan dokumen kependudukan terkait pendaftaran penduduk	Terlaksanya pelayanan keliling	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	11 Kecamatan	100%	62.000.000				45.396.142
2	12	03			<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>								<b>71,100,000</b>			<b>71,100,000</b>	
2	12	03	2.01		<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>								<b>71,100,000</b>			<b>71,100,000</b>	

2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	-Jumlah akte kelahiran yang diterbitkan -Jumlah akte kematian yang diterbitkan -Jumlah Akte Perkawinan yang diterbitkan	Terlaksananya pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A.kelahiran 96% A.kematian 100% A.perkawinan 100%		100%	36,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				36,100,000
2	12	04			<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>								<b>62.737.500</b>					<b>62.737.500</b>
2	12	04	2.01		<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>								<b>62.737.500</b>					<b>62.737.500</b>
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah informasi administrasi adminduk yang dikelola	Jumlah informasi administrasi adminduk yang dikelola	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 Kecamatan		100%	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				11.000.000
2	12	04	2.01	01	Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah OPD PKS pemanfatan data dengan pengguna	Jumlah hak akses pemanfaatan data ware house kependudukan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 OPD		100%	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				35.500.000
					Pemutakhiran data penduduk	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah KK yang telah dimutakhirkan	Terlaksananya pemutakhiran data oenduduk	Terlaksananya pemutakhiran data oenduduk	3 Kec		100%	17.737.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				16.237.500
2	12	05	2.01		<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>								<b>66,300,000</b>					<b>72,930,000</b>
2	12	04	2.03	04	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Buku Profil dan Agregate Perkembangan Data Kependudukan, Terlaksananya Pemutakhiran Data Kependudukan	Terdapatnya buku profil dan aggregate Perkembangan Data Kependudukan, Terlaksananya Pemutakhiran Data Kependudukan	Jumlah Buku Profil dan Agregate Perkembangan Data Kependudukan, Terlaksananya Pemutakhiran Data Kependudukan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 buku, 5 Nagari	2 buku, 5 Nagari	66,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	2 buku, 5 Nagari	2 buku, 5 Nagari	72,930,000
<b>TOTAL</b>												<b>5,993,299,071</b>					<b>6,592,628,978</b>	

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2023. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja akan sangat bergantung kepada komitmen dan kerjasama semua pihak yang terkait. Diperlukan sinergitas antar semua pihak dalam pencapaian tujuan, program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Penyusunan Renja sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana program untuk pembangunan 1 tahun kedepan. Selain sebagai kontrol terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan OPD pada akhir tahun anggaran.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Tahun 2023

Unit Organisasi : DisdukCapil

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Induktif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
5					Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah					100%			3.785.023.653	
5	01	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,002,508,097		
5	01	01	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah PNS yang menerima gaji dan tunjangan	Persentase realisasi keuangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	24 Orang	100%	2,761.054.379	DAU	
5	01	01	2.0 2	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanakan Tugas ASN	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah Non PNS(PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran	Persentase realisasi keuangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	38 Orang	100%	155.873.718	DAU	
5	01	01	2.0 2	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	Persentase realisasi keuangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	7 Orang	100%	85.580.000	DAU	

5	01	01	2.0 3		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>								<b>15,600,000</b>	
5	01	01	2.0 3	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah ASN penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola BPBD	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 Orang	2 Unit	15,600,000	DAU
2	12	01	2.0 5		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								<b>57,705,500</b>	
5	01	01	2.0 5	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah spanduk yang dicetak	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 angkatan	100%	39.605.500	DAU
5	01	01	2.0 5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/diklat	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5 Orang	100%	18.100.000	DAU
5	01	01	2.0 6		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								<b>164.372.556</b>	
5	01	01	2.0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah penyediaan alat listrik dan elektronik	Persentase penyediaan alat listrik dan elektronik	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Paket	100%	5.151.000	DAU
1	05	01	2.0 6	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	Persentase penyediaan peralatan rumah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Paket	1 Paket	24.000.000	DAU

5	01	01	2.0 6	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah pemenuhan barang cetak dan penggandaan	Pemenuhan barang cetak dan penggandaan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Paket	1 Paket	21.244.721	DAU
2	12	01	2.0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase supras kependudukan dan identitas resmi anak	Jumlah supras dokumen kependudukan dan identitas resmi anak	Jumlah supras dokumen kependudukan dan identitas resmi anak	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	20000 Keping	20000 Keping	20000 Keping	DAU
5	01	01	2.0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Persentase pelayanan akses DWH dan PKS, Persentase terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi OPD	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Kali	100%	75.350.000	DAU
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.0 7</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>									<b>35.500.000</b>	
5	01	01	2.0 7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Unit	100%	35.500.000	DAU
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.0 8</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									<b>271,276,000</b>	
5	01	01	2.0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Air, listrik, dan internet untuk operasional Kantor	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan	100%	100,000,000	DAU

5	01	01	2.0 8	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah Pelayanan secara aktif, jumlah Cetak Tanda terima,	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor , Persentase penyediaan pelayanan keliling	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Bulan	100%	75.000.000	DAU
5	01	01	2.0 8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah ATK yang di butuhkan	Persentase pemenuhan kebutuhan ATK	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 paket	100%	78.500.000	DAU
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.0 9</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									<b>155.200.000</b>	
5	01	01	2.0 9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	21 Unit	100%	75,200,000	DAU
5	01	01	2.0 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	48 Unit	100%	55.000.000	DAU
5	01	01	2.0 9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang terpelihara	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Unit	100%	25.000.000	DAU

2	12	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>									<b>36.375.000</b>	
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	Laporan	100%	36.375.000	DAU
2	12	02			<b>Program Pendaftaran Penduduk</b>	Kepemilikan dokumen kependudukan masyarakat terkait pendaftaran penduduk						<b>101.963.219</b>		
2	12	02	2.01	<b>Pelayanan Pendaftaran penduduk</b>									<b>91.963.219</b>	
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	terlaksananya pendataan penduduk rentan adminduk	terlaksananya pendataan penduduk rentan adminduk	terlaksananya pendataan penduduk rentan adminduk	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 Kecamatan	11 Kecamatan	11 Kecamatan	56.200.000	DAU
2	12	02	2.01	02	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	35.763.219	DAU
2	12	02	2.04	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>									<b>10.000.000</b>	DAU

2	12	02	2.0 4	02	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	10.000.000	DAU
2	12	03			<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Rasio kepemilikan dokumen kependudukan</b>						<b>90%</b>	<b>71.100.000</b>	
2	12	03	2.0 1		<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>								<b>36.100.000</b>	
2	12	03	2.0 1	01	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	1. Jumlah Akte kelahiran yang diterbitkan 2. Jumlah Akte kematian yang diterbitkan 3. Jumlah Akte Perkawinan yang diterbitkan	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A. Kelahiran 96%, A. Kematian 100%, A. Perkawinan 100%		100%	36.100.000	DAU
2	12	03	2.02		<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>								<b>35.000.000</b>	DAU
					Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya penerbitan akta kelahiran Terlaksananya penerbitan akta kematian Terlaksananya penerbitan akta perkawinan	Terlaksananya penerbitan akta kelahiran Terlaksananya penerbitan akta kematian Terlaksananya penerbitan akta perkawinan	Terlaksananya penerbitan akta kelahiran Terlaksananya penerbitan akta kematian Terlaksananya penerbitan akta perkawinan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23000 akta 1000 akta 50 pasang			35.000.000	DAU

2	12	04			<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	Jumlah instansi yang memiliki PKS dan akses pemanfaatan data adminduk							15 OPD	155,000,000	
2	12	04	2.0 1		<b>Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian data base kependudukan</b>								1,000,000		
2	12	04	2.0 1	01	Pengolahan dan penyajian data kependudukan	Jumlah data kecamatan yang diolah, jumlah data yang disajikan	Jumlah informasi administrasi Adminduk yang dikelola	Jumlah informasi administrasi Adminduk yang dikelola	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 Kec, 3 buku		100%	10.000.000	DAU	
2	12	04	2.0 3		<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>								145.000.000	DAU	
2	12	02	2.0 3	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah hak akses pemanfaatan data ware house kependudukan	Jumlah hak akses Pemanfaatan Data ware house kependudukan	Jumlah hak akses Pemanfaatan Data ware house kependudukan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 OPD		100%	35.000,000	DAU	
2	12	04	2.0 3	08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Terlaksananya pemukhtahiran data kependudukan	Terlaksananya pemukhtahiran data kependudukan	Terlaksananya pemukhtahiran data kependudukan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 Kecamatan			110.000.000	DAU	
<b>TOTAL</b>												<b>4.072.824.372</b>			

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 ini merupakan kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Pasaman Barat 2021-2026. Pada dasarnya Rencana Kerja perubahan Tahun 2023 mengurai target kinerja yang hendak dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2023 mencakup 11 kegiatan dalam 4 program untuk mencapai 2 sasaran dan 1 tujuan. Namun demikian kegiatan yang ada telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta dinamika yang berkembang dalam masyarakat, dan juga menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Dengan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 ini diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung tercapainya masyarakat Pasaman Barat yang sejahtera, demokratis dan agamis.

Simpang Empat, Januari 2022

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

